



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 (REVIEW)

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SIDOARJO

BERITA ACARA
REVIEW RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Empat Bulan Nopember Tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, telah dilaksanakan Review Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

Dari hasil review tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Sebagai Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2019, dan adanya Pandemi Covid 2019 serta evaluasi internal yang telah dilakukan, maka perlu dilakukan review terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021.
2. Bahwa setelah dilakukan review; ukuran kinerja, indikator keberhasilan kinerja, serta target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 – 2021 memerlukan perbaikan untuk penyempurnaan dengan penyesuaian target yang akan dicapai sampai dengan akhir masa Renstra di tahun 2021
3. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021, masih relevan untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;

Demikian kesimpulan hasil review Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2020 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 4 Nopember 2020
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KAB. SIDOARJO



MOHAMAD EDI KURNIADI, ST.MM
Pembina Tk.I
NIP.196906051994031006

Sebelum perubahan

NO	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1. Meningkatkan Aktivitas Ekonomi masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatkan Koperasi yang berkualitas 2. Meningkatkan Usaha Mikro yang mandiri	1 Persentase Koperasi yang Berkualitas	16,48 %	18,15 %	19,83 %	21,5 %	23,18%
			2 Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	0,50 %	1,05 %	1,50 %	2,25 %	2,5 %

Setelah perubahan

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Jangka Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

NO	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1. Meningkatkan Aktivitas Ekonomi masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatkan Koperasi yang berkualitas 2. Meningkatkan Usaha Mikro yang mandiri	1 Persentase Koperasi yang Berkualitas	16,48 %	18,15 %	19,83 %	20,5 %	21,9%
			2 Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	0,50 %	1,05 %	1,50 %	1,75 %	1,87 %

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, kami telah dapat menyusun Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016 -2021. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Lima Tahunan ini berpijak pada hasil Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 – 2021 dan Permendagri No 90 tahun 2019 .

Perubahan Rencana Strategis ini memuat target, tujuan, sasaran, serta strategi implementasi yang ditetapkan. Dengan adanya Rancangan Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo , sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya nanti memiliki kompetensi dan rasa kebersamaan untuk menuju sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikian, semoga Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan manfaat bagi kelancaran tugas dan peningkatan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo, 4 Nopember 2020
KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KAB. SIDOARJO



MOHAMAD EDI KURNIADI,ST.MM
Pembina Tk.I
NIP.196906051994031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 dan 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 yang berdampak pada adanya perubahan di beberapa Program, sehingga berdampak pada perubahan beberapa kegiatan yang menyesuaikan dan memenuhi serta mendukung baik capaian Program, Sasaran maupun Tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Adanya pandemic covid 19 yang melanda mengakibatkan Anggaran difocusing untuk penanganan Covid sehingga perlu adanya perubahan angka target dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk tahun 2020-2021. Dan dengan adanya perubahan Renstra ini maka diharapkan terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Proses Penyusunan Perubahan rencana strategis berdasarkan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bab I Pasal 1 yang berbunyi “Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”, perencanaan di Daerah ada dua yakni Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, khusus Rencana Perangkat Daerah sebagaimana pasal 11 ayat (3) disebutkan Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : (a) Renstra Perangkat daerah; dan (b) Renja Perangkat Daerah. Dalam Pasal pasal 13 ayat (1) “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas atau fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam menyusun Perubahan Renstra PD mengikuti alur sesuai dengan urutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2016 - 2021 (Perubahan) dengan menyesuaikan

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta pagu yang bersifat indikatif.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo ini menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo, selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD setiap tahunnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan Rencana Strategi (perubahan) menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo serta Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 menjadi pedoman dalam menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja PD (Renja PD) setiap tahunnya.

Sesuai hasil review terhadap Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maka Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mencakup :

1. Penyempurnaan Indikator dan Target Kinerja
2. Penyesuaian Nomenklatur Program dan Kegiatan
3. Penyederhanaan Kegiatan

Penyusunan Review Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

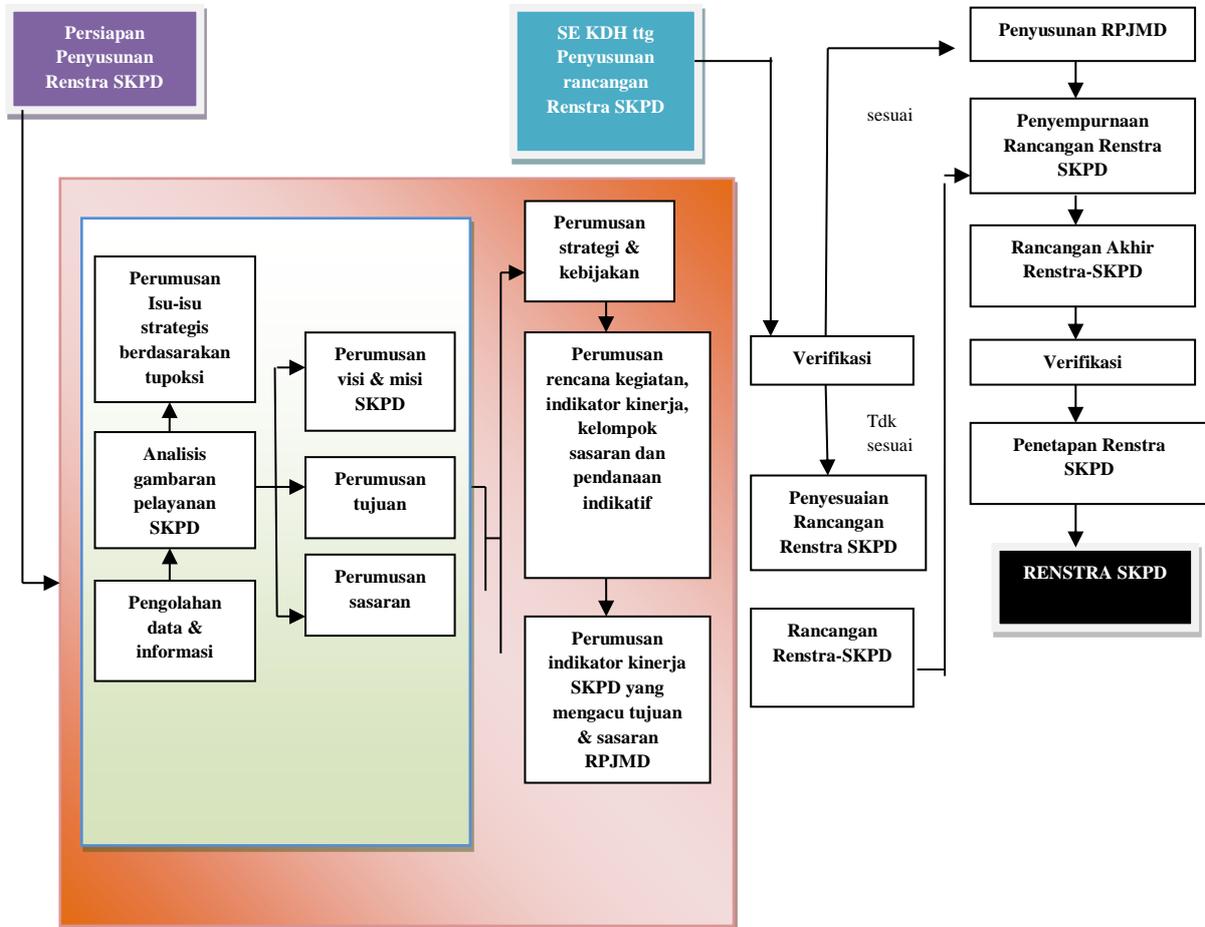
RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Permendagri No.86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan : a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan Dalam penyusunan perubahan tersebut rancangan Renstra sesuai amanat pasal 60 ayat (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk di verifikasi, dan pada pasal 60 ayat (2) disebutkan "Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), "untuk memastikan kesesuaian rancangan awal renstra Perangkat Daerah dengan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 57". Dalam Proses penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat : a. Pendahuluan; b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. Tujuan dan sasaran; e. Strategi dan arah kebijakan; f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan; g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. Penutup

Adapun tahapan penyusunan Perubahan renstra dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 : Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro/LKM;
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140) ;

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP 18 Tahun 2016;
- 14) Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

15) Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16) Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 dan memberikan arah (*road map*) untuk mewujudkan visi, misi Daerah dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Adapun penyusunan Review Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016 - 2021 ini bertujuan :

1. Sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo;
2. Sebagai arah tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui perencanaan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas;
3. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 2016 hingga 2021;
4. Sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan perubahan rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.

Bab III : Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah

Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kemudian penentuan isu-isu strategis

Bab IV : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah daerah

Menjelaskan tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam lima tahun mendatang.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menjelaskan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam lima tahun mendatang.

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

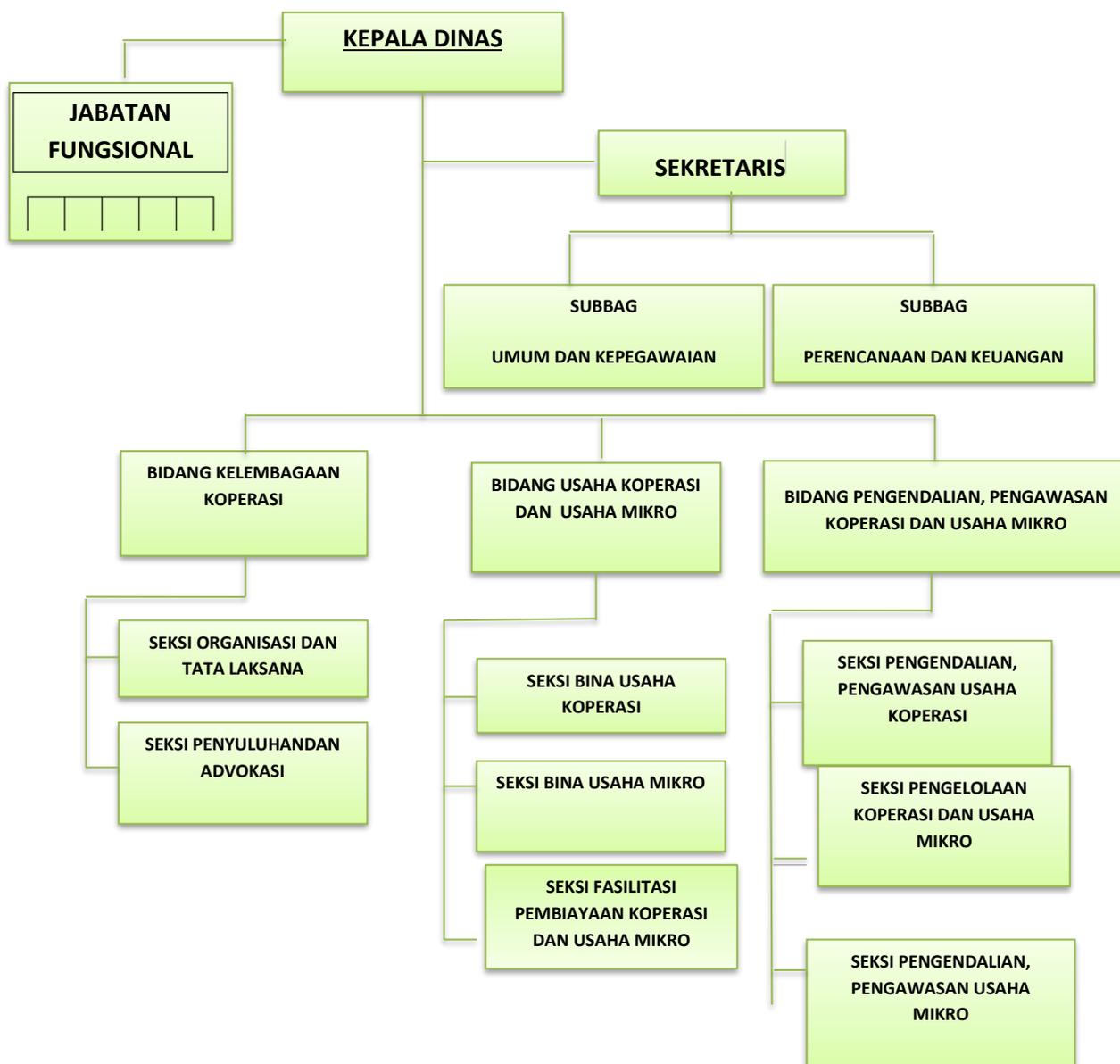
2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang rincian, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Berikut ini struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo :

Gambar 1. BAGAN STRUKTUR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Bidang Kelembagaan Koperasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi
 - b. Seksi Penyuluhan dan Advokasi Koperasi
 2. Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Usaha Koperasi
 - b. Seksi Bina Usaha Mikro
 - c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
 3. Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha Mikro
 - c. Seksi Pengelolaan Data Koperasi dan Usaha Mikro

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

1. Perencanaan Program Bidang Koperasi dan Kesekretariatan;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dinas;
4. Pembinaan Pelaksanaan Tugas Bawahan;
5. Pelaporan Pelaksanaan Tugas Kepada Bupati;
6. Pelaksanaan Tugas Lain yang Diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya

Berikut ini merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yaitu :

SEKRETARIAT mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
2. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Sekretariat mempunyai 2 sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
 - b. Melaksanakan pengelolaan barang;
 - c. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
 - b. Menyusun laporan dinas;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
 - d. Melaksanakan administrasi keuangan;
 - e. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
 - f. Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelembagaan koperasi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis kelembagaan koperasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya

Unsur pelaksana Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari :

1. **SEKSI ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KOPERASI**, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis organisasi dan tata laksana koperasi;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi, meliputi :
 - 1. Pelayanan pembentukan dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubaran Koperasi serta izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
 - 2. Pembinaan penataan organisasi dan tata laksana koperasi;
 - 3. Penyusunan standarisasi pelayanan koperasi (termasuk uji kompetensi pengurus / pengelola koperasi).
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis organisasi dan tatalaksana koperasi;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
2. SEKSI PENYULUHAN DAN ADVOKASI KOPERASI, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi, meliputi :
 - 1. Penyusunan materi penyuluhan perkoperasian;
 - 2. Pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - 3. Advokasi dan konsultasi hukum serta fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang perkoperasian;

- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyuluhan dan advokasi koperasi;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang usaha koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis usaha koperasi dan usaha mikro;
- b. Pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Unsur pelaksana Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri dari:

- 1. **SEKSI BINA USAHA KOPERASI**, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi, meliputi :
 - 1. Penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi;
 - 2. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha koperasi (promosi, pameran, misi dagang, kerja sama antar koperasi, koperasi dengan badan usaha lain);
 - 3. Melaksanakan penilaian kesehatan koperasi;
 - 4. Pendampingan usaha simpan pinjam koperasi yang kurang atau tidak sehat;
 - 5. Melaksanakan diklat dan uji SKKNI pengelola koperasi;

6. Melaksanakan analisa dampak usaha simpan pinjam koperasi;
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha koperasi;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
2. SEKSI BINA USAHA MIKRO, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina usaha mikro;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina usaha mikro, meliputi :
 1. Penyusunan pemberdayaan dan bimbingan usaha mikro;
 2. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha mikro (promosi, pameran, misi dagang, kerja sama antar usaha mikro, usaha mikro dengan badan usaha lain);
 3. Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
 4. Melaksanakan diklat dan uji sertifikasi kewirausahaan.
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina usaha mikro;
 - d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
3. SEKSI FASILITASI PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro, meliputi :
 - 1. Fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro, jasa keuangan dan penjaminan kredit;
 - 2. Koordinasi dengan lembaga perbankan dan non perbankan;
 - a. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis fasilitasi pembiayaan koperasi dan usaha mikro;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BIDANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro
- b. Pelaksanaan kegiatan pengendalian; pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian, pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Unsur pelaksana Bidang Pengendalian, Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :

3. **SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KOPERASI**, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi, meliputi :
 1. Bimbingan sistem pengendalian intern (SPI) koperasi;
 2. Teknis pengawasan dan audit koperasi/ unit simpan pinjam Koperasi;
 3. Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha koperasi hasil pembiayaan;
 - c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan koperasi;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.
4. **SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN USAHA MIKRO**, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro, meliputi :
 1. Bimbingan pelaksanaan administrasi yang baik bagi usaha mikro;
 2. Bimbingan, pengawasan dan audit usaha mikro terkait pinjaman modal dari pemerintah;
 3. Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha mikro hasil pembiayaan;

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pengawasan usaha mikro;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. SEKSI PENGELOLAAN DATA KOPERASI DAN USAHA MIKRO

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan data koperasi dan usaha mikro;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengelolaan data koperasi dan usaha mikro meliputi akurasi data koperasi dan usaha mikro melalui pendataan, kemitraan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengelolaan data koperasi dan usaha mikro;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan asset yang penting dalam suatu instansi yang harus selalu ditingkatkan kualitasnya karena merupakan modal yang menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik, Secara umum pegawai dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo hingga Bulan

Nopember tahun 2020 berjumlah 35 orang, dari total tersebut 17 berjenis kelamin laki-laki dan 18 Perempuan sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar pegawai berpendidikan SLTA yaitu sebanyak 17 dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, berpendidikan D3 sebanyak 3 Orang, Sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 10 Orang, berpendidikan S2 sebanyak 5 orang, ditampilkan tabel sebagai berikut:

Tabel.1
Struktur SDM di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Sidoarjo berdasarkan Jenis kelamin dan Pendidikan

NO	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS
1	MENURUT JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	17
		PEREMPUAN	18
2	MENURUT PENDIDIKAN	S2	5
		S1	10
		D3	3
		SLTA	17
		SLTP	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar SDM di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten berpendidikan SLTA Kondisi ini menunjukkan bahwa SDM yang mendukung kinerja dinas dinilai cukup kompeten dan dapat meningkatkan kapasitasnya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dibawah ini ditunjukkan struktur SDM berdasarkan Jabatan struktural dan Fungsionalnya serta golongannya.

1. Tabel.2

Struktur SDM di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Jabatan dan Golongan

N O	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH PNS
1	MENURUT JABATAN	ESELON II/b	1
		ESELON III /a	0
		ESELON III/b	3
		ESELON IV	8
2	MENURUT GOLONGAN	GOL IV	4
		GOL III	19
		GOL II	12

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari Jabatan Eselon dan Golongan menunjukkan sebaran yang relatif merata terdapat Eselon II/b sebanyak 1 Orang yaitu Kepala Dinas, Untuk Eselon III/a sejumlah 0 Orang yaitu Sekretaris (Pejabat lama Pensiun Pada bulan Oktober 2020) , Eselon III/b sejumlah 3 (Tiga) orang yaitu Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan dan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sedangkan untuk Eselon IV berjumlah 8 orang, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasi Pengelola data Koperasi dan UM, Kasi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi, Kasi Ortala, Kasi Penyuluhan dan Advokasi, Kasi Bina Usaha Koperasi dan Kasi Bina Usaha Mikro, terdapat 2 Jabatan yang kosong yaitu Kasi Fasilitasi Pembiayaan Koperasi dan UM, Kasi Pengendalian dan Pengawasan Koperasi.

Tabel 2.2.
STRUKTUR SDM BERDASARKAN ESELON, PEJABAT FUNGSIONAL DAN GOLONGAN

NO.	KLASIFIKASI	URAIAN	JUMLAH
1	MENURUT ESELON	ESELON II/a	1
		ESELON III/a	0
		ESELON III/b	3
		ESELON IV/a	8
2	FUNGSIONAL	KOPERASI	-
		INDUSTRI	-
		PENERA	-

Sumber Data :Sub BagianUmum dan Kepegawaian

Berdasarkan kapasitas SDM dilihat dari eselon, fungsional dan golongan menunjukkan sebaran yang relatif merata sesuai dengan kebutuhan. Menurut eselonnya, sebagian besar pegawai merupakan eselon IV (8orang). Sedangkan pegawai lainnya mempunyai eselon III (3orang) dan II (1 orang).

2.2.2. Aset

Berikut ini merupakan jumlah aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo hingga Bulan Nopember tahun 2020 yang terdiri dari:

Tabel 2.3. Kondisi Tanah dan Bangunan

NO	TANAH BANGUNAN	LOKASI	LUAS (M ²)	KONDISI (%)	KET
1.	Tanah Kantor	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo	967	Baik	Sertifikat
2.	Bangunan Kantor	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo	2.347	Baik	-
3.	Musholla	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo	37,75	Baik	-
4.	Parkir	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Kab. Sidoarjo	136	Baik	-

Pada tahun anggaran 2015 semula gedung Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Sidoarjo dilakukan rehabgedung dengan anggaran sebesar 2,4 Milyar dan dilanjutkan kembali pelaksanaan rehab gedung pada tahun anggaran 2016 dengan nilai anggaran sebesar 7,4 Milyar sehingga tercapai target sebesar 100 persen. Luas tanah beserta bangunan adalah 3.314 M² diperuntukan untuk 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, merupakan modal penting dalam mewujudkan capain kinerja kedepan.

Tabel 2.4. Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas

NO	JENIS	MERK	TAHUN KENDARAAN	JUMLAH (Unit)
1	Station Wagon	Toyota Innova	2007	1
1	Station Wagon	Toyota Innova	2010	1
2	Station Wagon	Toyota Avanza	2011	1
4	Station Wagon	Daihatsu Terios	2012	2
5	Station Wagon	Nissan Grand Livina	2014	1
6	Sepeda Motor	Honda Vario	2014	1
7	Sepeda Motor	Honda Supra X125	2014	2
8	Sepeda Motor	Honda Supra Xspok	2014	1
9	Sepeda Motor	Honda	2012	1
10	Sepeda Motor	Suzuki Drive	2012	1
11	Sepeda Motor	Suzuki	2012	1
12	Sepeda Motor	Yamaha Zupiter	2014	2
13	Sepeda Motor	Yamaha Mio	2014	3
JUMLAH				18

Alat transportasi kendaraan roda empat sebanyak 6 buah merupakan kepemilikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan kondisibaik. Sedangkan kendaraan roda dua berjumlah 12 buah dengan kondisi baik dan layak pakai. Kondisi diatas menunjukkan bahwa ketersediaan alat transportasi milik kantor diharapkan dapat menunjang dan meningkatkan kinerja.

Tabel 2.5. Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1	Lemari Arsip	23	Unit	Baik
2	Televisi LED	4	Unit	Baik
3	Komputer	12	Unit	Baik
4	Laptop	6	Unit	Baik
5	Printer	17	Unit	Baik
6	Kursi Rapat	107	Unit	Baik
7	Kulkas	2	Unit	Baik
8	Mesin Absensi	1	Unit	Baik
9	AC	19	Unit	Baik
10	Meja Kerja	17	Unit	Baik
11	LCD Proyektor	1	Unit	Baik
12	Jaringan Wireless	1	Paket	Baik
13	Kursi Sofa	4	Set	Baik
14	Jaringan Internet	1	Unit	Baik
15	Laterbox	1	Unit	Baik
16	Papan Struktur Organisasi	1	Unit	Baik
17	Meja Kepala Dinas	1	Unit	Baik
18	Handycam	1	Unit	Baik
19	Mesin ketik manual	1	Unit	Baik
20	Kamera CCTV	8	Unit	Baik
21	Monitor CCTV	2	Unit	Baik
22	Kamera Digital	5	Unit	Baik
23	Sound Sistem	1	Paket	Baik
24	Penghancur Kertas	2	Unit	Baik
25	Hepa Filter	3	Unit	Baik
26	Kipas Angin	4	Unit	Baik

Secara keseluruhan dari tabel di atas memperlihatkan bahwa peralatan kantor dalam kondisi belum mencukupi kebutuhan dalam menunjang aktivitas kerja di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai OPD baru. Sehingga perlu tambahan sarana dan prasarana untuk mendukung dinas dalam mencapai kinerjanya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, maka mulai tahun 2017 kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mengalami perubahan, yang semula merupakan satu kesatuan dalam Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral berubah menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021, mengacu kepada indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 khususnya bidang Koperasi dan Usaha Mikro, yaitu:

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, dengan indikator kinerja :

- *Persentase Koperasi yang Berkualitas*

2. Meningkatnya Usaha Mikro yang mandiri, dengan indikator kinerja :

- *Persentase Usaha Mikro yang Mandiri*

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam hal ini sebagai Pembina Urusan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai layanan kedinasan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan yang ada, pelayanan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi :

a. Pemberian dan fasilitasi penyuluhan / sosialisasi tentang perkoperasian

b. Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Pengurus Koperasi

c. Pemeringkatan Koperasi.

d. Penilaian kesehatan koperasi

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

- e. Penyusunan usaha dan diversifikasi usaha mikro
- f. Pelatihan kepada usaha mikro
- g. Sedekah Ilmu dari, oleh dan untuk usaha mikro
- h. Pelaksanaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro
- i. Pengembangan perluasan akses pembiayaan / permodalan bagi koperasi dan usaha mikro
- j. Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro

Sebagai upaya pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021 tersebut diatas, sebelum adanya Permendagri no 90 tahun 2019 didukung dengan 3 Program yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
3. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Setelah diterbitkannya Permendagri no 90 tahun 2019, maka program pada dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang mendukung Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi menjadi 6 (Enam) Program sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM

Keenam program tersebut telah dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah
8. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
9. Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota
10. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah/kabupaten/kota
11. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota
12. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
13. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
14. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dan dijabarkan menjadi sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD
7. Penataan usaha barang milik daerah SKPD
8. Penyediaan Komponen instalansi listrik/Penerangan Bangunan kantor
9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
10. Penyediaan bahan logistik kantor
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan bahan/material
14. Fasilitasi Kunjungan tamu
15. Penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD
16. Penyediaan peralatan dan mesin lainnya
17. Penyediaan jasa surat menyurat
18. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
19. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
20. Penyediaan jasa pelayanan umum

21. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat kendaraan dinas operasional atau lapangan
22. Pemeliharaan mebel
23. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
24. Pemeliharaan asset taj berwujud
25. Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
26. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
27. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturab perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota
28. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota
29. Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/Kota
30. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasianserta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
31. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses embiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
32. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
33. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
34. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro
35. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

36. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Analisis Lingkungan Internal maupun Eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi perlu menjadi perhatian agar pelayanan kinerja dapat tercapai. Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) mengidentifikasi adanya kekuatan, dan kelemahan. Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) mengidentifikasi adanya peluang dan tantangan/ancaman. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun hasil pencermatan lingkungan seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Identifikasi Lingkungan Strategis

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Peluang (<i>Opprtunities</i>)
1. Memiliki Klinik Konsultasi bagi Koperasi dan Usaha Mikro	1. Adanya Regulasi yang Mendukung Koperasi dan Usaha Mikro
2. Memiliki SDM yang Potensial	2. Peluang Pengembangan Usaha Luas
3. Memiliki Sarana dan Prsarana Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang Memadai	3. Pasar Koperasi dan Usaha Mikro Terbuka Luas
4. Sumber Dana Pemberdayaan Memadai	4. Dukungan dari Berbagai <i>Stakeholders</i>
5. Komitmen Pemerintah Kabupaten terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Tinggi	5. Tersedianya dana pinjaman lunak untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro
Kelemahan (<i>Weakness</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
1. Pemberdayaan SDM Aparatur Koperasi dan Usaha Mikro Belum Optimal	1. Terbukanya Pasar Bebas (diberlakukannya <i>Asean Economic Community (AEC)</i>)
2. Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi di Koperasi dan Usaha Mikro Belum Optimal	2. Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro Masih Rendah
3. Sinergitas dengan Instansi Lain dan Daerah Kurang Optimal	3. Rendahnya Kualitas Kelembagaan Koperasi
4. Belum Adanya Roadmap Koperasi dan Usaha Mikro Potensial	4. Teknologi Masih Rendah di Koperasi dan Usaha Mikro
5. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan	5. Administrasi Usaha/Pembukuan Koperasi dan Usaha Mikro Masih Rendah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka dukungan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki koperasi dan usaha mikro sehingga koperasi dan usaha mikro dapat lebih berkembang dan berdaya saing baik tingkat nasional maupun internasional, meliputi antara lain:

- 1) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
- 2) Peningkatan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
- 3) Peningkatan Akses Pasar Koperasi dan Usaha Mikro
- 4) Peningkatan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi Koperasi dan Usaha Mikro
- 5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
- 6) Penguatan Jatidiri Koperasi
- 7) Peningkatan Kualitas Koperasi
- 8) Penumbuhan Motivasi Berkoperasi
- 9) Pengawasan dan Pengendalian Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
- 10) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro
- 11) Peningkatan Jaringan Usaha dan Kemitraan
- 12) Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha
- 13) Fasilitasi Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro
- 14) Penguatan Tatakelola dan Jaringan Koperasi
- 15) Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Usaha Mikro
- 16) Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

17) Visualisasi Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dalam konstelasi nasional maupun daerah, keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro telah menunjukkan peranannya yang cukup baik, namun masih banyak hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga Koperasi dan Usaha Mikro belum berkembang secara optimal. Untuk itu perlu diberikan prioritas utama dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Adapun implementasi program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan strategis. Kegiatan strategis dimaksud dilakukan dalam berbagai bentuk pengembangan kebijakan, penguatan, fasilitasi, pendampingan dan dukungan langsung bagi para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro. Adapun pengembangan kegiatan strategis tersebut diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan Usaha Mikro.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam kualitas pelayanan OPD, terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo diidentifikasi pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo

	Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Meningkatkan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi Aktif	Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam pengembangan	Rendahnya produktivitas SDM koperasi dan usaha mikro	Belum ada roadmap pengembangan koperasi dan usaha mikro potensial
		Jumlah Usaha Mikro Mandiri	, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro		Belum adanya data koperasi dan usaha mikro
	Terbukanya Akses Pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang memperoleh akses pembiayaan	Koordinasi didalam rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo	Rendahya Tenaga Surveyor dan Kredibilitas Koperasi dan Usaha Mikro	Sinergitas dengan instansi lain/lembaga keuangan yang belum optimal
	Meningkatkan Minat Wirausaha	Jumlah Wira Usaha Baru	Ketersediaan Dukungan Anggaran	Rendahnya kemampuan untuk mengembangkan jiwa entrepreneur dari usaha mikro	Perlu Pola Pengembangan Usaha Mikro secara menyeluruh dari berbagai aspek

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visiyaitu:

Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan

Visitersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Mandiri : Kabupaten Sidoarjo harus mampu mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan potensi diri, mampu mencukupi kebutuhannya sendiri secara layak dengan mengoptimalkan berbagai keunggulan dan peluang yang dimiliki guna mencapai kesejahteraan.
- b. Sejahtera : Makmur, aman, nyaman dan sentosa serta terlepas dari segala macam gangguan baik material maupun spiritual pada aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan HAM.
- c. Berkelanjutan : Proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan/dijabarkan dalam 5 *Misi* adalah:

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	1. Meningkatnya akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Misi 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	3. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat 4. Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat
Misi 3 : Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	5. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
Misi 4 : Meningkatnya Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlaqul karimah Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME Serta Dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban	Mewujudkan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Berbudaya, Rukun, Aman, Tertib, Nyaman dan Berkeadilan	7. Meningkatkan Keamanan, Kenyaman dan Ketertiban Umum yang Berkeadilan
Misi 5 : Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur serta Kelestarian Lingkungan Hidup	8. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur daerah 9. Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo mendukung misi kedua yaitu *Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat*. Misi tersebut memiliki tujuan *Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing* dengan sasaran :

1. Meningkatkan Pendapatan Per Kapita Masyarakat
2. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat

Peran Koperasi dan Usaha Mikro sebagai penggerak perekonomian untuk tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan sasaran meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat melalui peningkatan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengembangkan produk kreatif, inovatif, berkualitas dan meningkatkan penggunaan produk Koperasi dan Usaha Mikro dalam negeri. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas - luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Koperasi dan Usaha Mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dinas Koperasi dan Koperasi dan Usaha Mikro dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi yang dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan

tujuan dan sasaran organisasi dengan tujuan dapat merumuskan kebijakan operasional di bidang perkoperasian dan Koperasi dan usaha mikro dengan harapan organisasi dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku koperasi dan usaha mikro.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi dan program dalam RPJMD sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro kabupaten Sidoarjo Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Dan Program Kela dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera Dan Berkelanjutan			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih yang Terkait dengan Pelayanan OPD	Permasalahan Utama Urusan Koperasi dan Usaha Mikro	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>Misi 2 : Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi Serta Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Program : 1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Program Pemberdayaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi - Rendahnya kelembagaan, SDM dan manajemen koperasi - Penggunaan teknologi informasi belum optimal - Daya saing, inovasi dan pengembangan produk koperasi dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga penyuluh/pendamping masih terbatas - Belum adanya SPM dan SOP - Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah - Kreasi dan inovasi produk usaha mikro masih rendah - Terbatasnya penyediaan peningkatan daya saing koperasi dan usaha mikro - Masih rendahnya media informasi/ sosialisasi terkait <i>entrepreneurship</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi Koperasi - Tersedianya regulasi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro - Terjalinnnya MOU dengan Bank Jatim dalam pendampingan pembiayaan - Telah memiliki <i>marketplace</i> TUKUO - Event promosi tahunan "Sidoarjo Fair" - Fasilitasi pelatihan teknis substantif produk koperasi dan usaha mikro

dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	usaha mikro masih rendah		- Adanya klinik koperasi dan usaha mikro
3. Progam Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	- Masih rendahnya minat wirausaha		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Kabupaten

Analisis komparasi antara Renstra Kementerian KUKM RI dengan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dibuat bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan untuk mengidentifikasi capaian sasaran, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian KUKM RI **Beserta**
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Pengembangan komoditas berbasis koperasi/sentra di sektor-sektor unggulan	- Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian	- Rendahnya rotasi dan mutasi SDM yang berkompeten dalam bidang koperasi	- Pemberdayaan koperasi dan usaha mikro merupakan urusan wajib
2. Meningkatkan daya saing koperasi dan umkm	- Alokasi anggaran belanja bidang ekonomi masih relatif kecil - Terbatasnya pengembangan saluran media untuk akses	- Kepedulian pada sektor koperasi dan usaha mikro masih rendah - Terbatasnya pengembangan saluran media untuk akses pasar	- Terjalannya hubungan antar <i>stakeholder</i> dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro - Mengembangkan hubungan interaktif antara

	<p>pasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perbankan 	<p>pemerintah dan pelaku usaha koperasi dan usaha mikro</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan
--	--	---	--

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Upaya pengembangan koperasi dan usaha mikro dalam perjalanannya tidak terlepas dari isu-isu strategis yang dihadapi. Isu-isu strategis tersebut harus dapat diidentifikasi sehingga pengembangan koperasi dan usaha mikro tidak mengalami stagnasi atau kemunduran. Isu strategis pemberdayaan koperasi dan usaha mikro merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2016-2021) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan perlu penyelesaian secara bertahap.

Permasalahan utama pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, meliputi antara lain :

1. Adanya Pandemi Virus corona
2. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.
3. Masih rendahnya kelembagaan, SDM dan manajemen koperasi.
3. Masih rendahnya akses pembiayaan dan akses pasar bagi usaha koperasi dan usaha mikro.
4. Penggunaan teknologi informasi belum optimal.

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

5. Daya saing produk koperasi dan usaha mikro masih rendah.
6. Masih rendahnya minat untuk wirausaha

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kebijakan bidang koperasi dan usaha mikro diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu *“Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat”*. dengan tujuan *Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing* dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pendapatan Per Kapita Masyarakat
2. Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021, memiliki tujuan yaitu: Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro.

Berdasarkan dari tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka ditetapkan sasaran strategis untuk mewujudkan pencapaian tujuan tersebut. Sasarannya adalah : Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas dan Meningkatkan Usaha Mikro yang Mandiri. Tujuan, sasaran serta indikator sasaran jangka menengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Jangka Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebelum di review**

NO	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1. Meningkatkan Aktivitas Ekonomi masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatkan Koperasi yang berkualitas 2. Meningkatkan Usaha Mikro yang mandiri	1 Persentase Koperasi yang Berkualitas	16,48 %	18,15 %	19,83 %	21,5 %	23,18%
			2 Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	0,50 %	1,05 %	1,50 %	2,25 %	2,5 %

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Serta Indikator Jangka Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro setelah di review**

NO	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1. Meningkatkan Aktivitas Ekonomi masyarakat melalui Koperasi dan Usaha Mikro	1. Meningkatkan Koperasi yang berkualitas 2. Meningkatkan Usaha Mikro yang mandiri	1 Persentase Koperasi yang Berkualitas	16,48 %	18,15 %	19,83 %	20,5 %	21,9 %
			2 Persentase Usaha Mikro yang Mandiri	0,50 %	1,05 %	1,50 %	1,75 %	1,87 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah suatu Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat daerah, bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

5.1.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki strategi pengembangan yaitu :

- Strategi 1 : Meningkatkan kualitas kelembagaan
- Strategi 2 : Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi
- Strategi 3 : Meningkatkan pemasyarakatan koperasi
- Strategi 4 : Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi terutama manajemen usaha koperasi berstandar nasional
- Strategi 5 : Meningkatkan akses penciptaan wirausaha baru
- Strategi 6 : Meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha baru
- Strategi 7 : Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna
- Strategi 8 : Meningkatkan fasilitasi permodalan usaha dana bergulir
- Strategi 9 : Meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha

5.1.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan visi, misi, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- Kebijakan 1 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan perkoperasian
 - a. Peningkatan kualitas/kompetensi SDM bagi pembina koperasi
 - b. Peningkatan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan dan pendampingan secara terus menerus pada Koperasi dalam menghadapi persaingan global
 - c. Optimalisasi revitalisasi Koperasi yang tidak aktif

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

- Kebijakan 2 : Peningkatan kemampuan pengetahuan, sikap dan ketrampilan SDM koperasi dan usaha mikro melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan
- Kebijakan 3 : Meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro
- Kebijakan 4 : Mendorong peningkatan daya saing produk dalam menghadapi persaingan global
- Kebijakan 5 : Meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi koperasi dan usaha mikro
- Kebijakan 6 : Meningkatkan pembinaan dan mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna bagi koperasi dan usaha mikro
- Kebijakan 7 : Meningkatkan pemanfaatan media komunikasi untuk diseminasi informasi wirausaha baru
- Kebijakan 8 : Meningkatkan kemampuan wirausaha baru melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
- Kebijakan 9 : Meningkatkan pembinaan dan pendampingan wirausaha baru yang telah dilatih

Tabel 4.2
Matriks Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran,
Strategi, dan Kebijakan

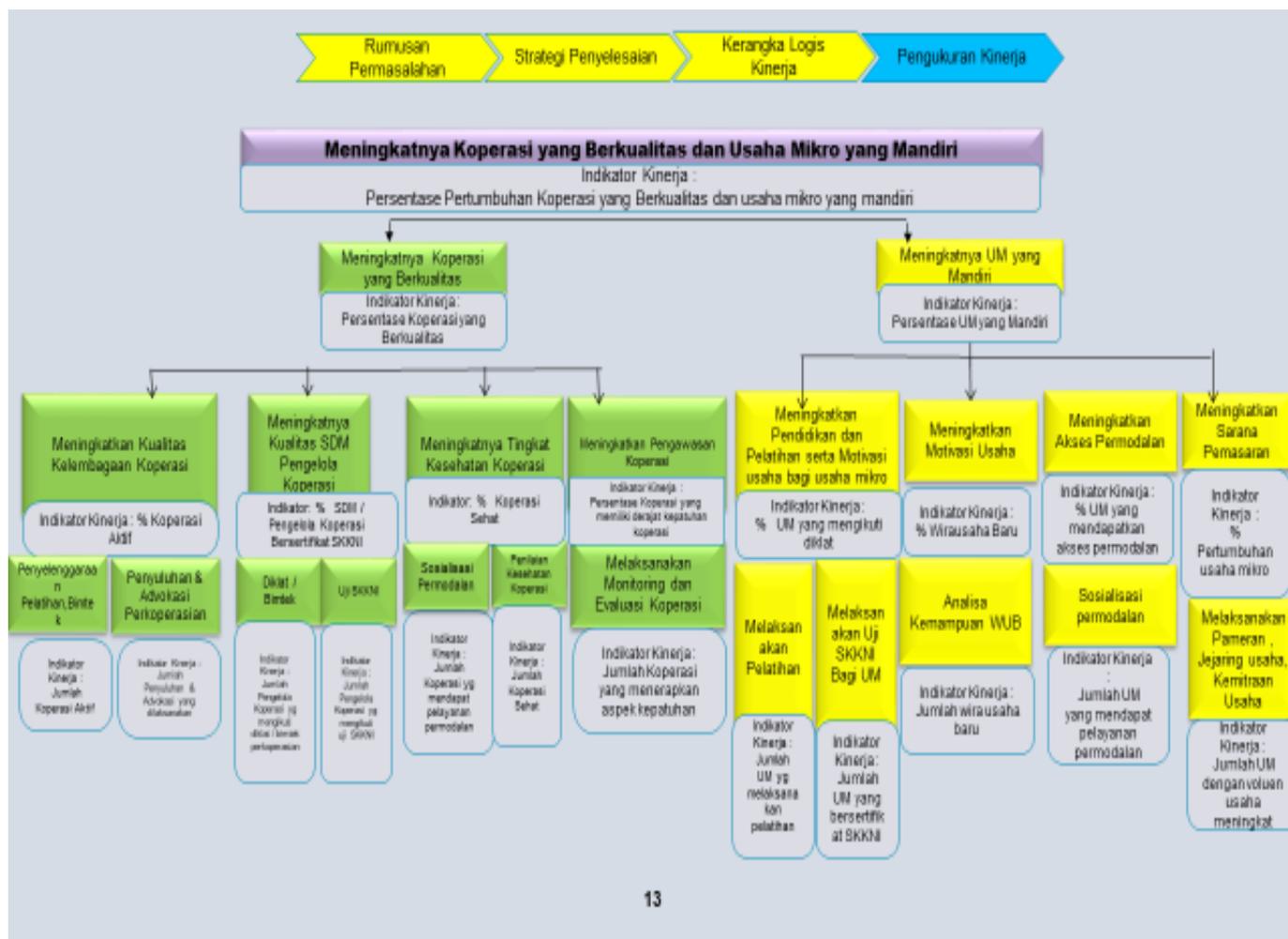
VISI : Kabupaten Sidoarjo yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan					
MISI 2 :Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat					
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Strategi	Kebijakan
Tujuan Ke-2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berdaya Saing	Sasaran Ke-3 : Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat Sasaran Ke-4 : Meningkatnya Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	1. Meningkatkan koperasi yang berkualitas 2. Meningkatkan Usaha Mikro yang Mandiri	1 Meningkatkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat melalui koperasi 2 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Mikro	1a. Meningkatkan kualitas kelembagaan 1b. Meningkatkan kapasitas SDM Koperasi 1c. Meningkatkan pemasyarakatan koperasi 1d. Meningkatkan penguatan manajemen usaha koperasi terutama manajemen usaha koperasi berstandar nasional	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaanpe rkoperasian 2. Peningkatan kemampuan pengetahuan, sikap dan ketrampilan SDM koperasi dan usaha mikro melalui bimtek, pendidikan dan pelatihan 3. Meningkatkan akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro

				<p>2a. Meningkatkan akses penciptaan wirausaha baru</p> <p>2b. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha baru</p> <p>2c. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna</p> <p>2d. Meningkatkan fasilitasi permodalan usaha dana bergulir</p> <p>2e. Meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha</p>	<p>4. Mendorong peningkatan daya saing produk dalam menghadapi persaingan global</p> <p>5. Meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi koperasi dan usaha mikro</p> <p>6. Meningkatkan pembinaan dan mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna bagi koperasi dan usaha mikro</p> <p>7. Meningkatkan pemanfaatan media komunikasi untuk diseminasi informasi wirausaha baru</p> <p>8. Meningkatkan kemampuan wirausaha baru melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan</p>
--	--	--	--	--	---

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

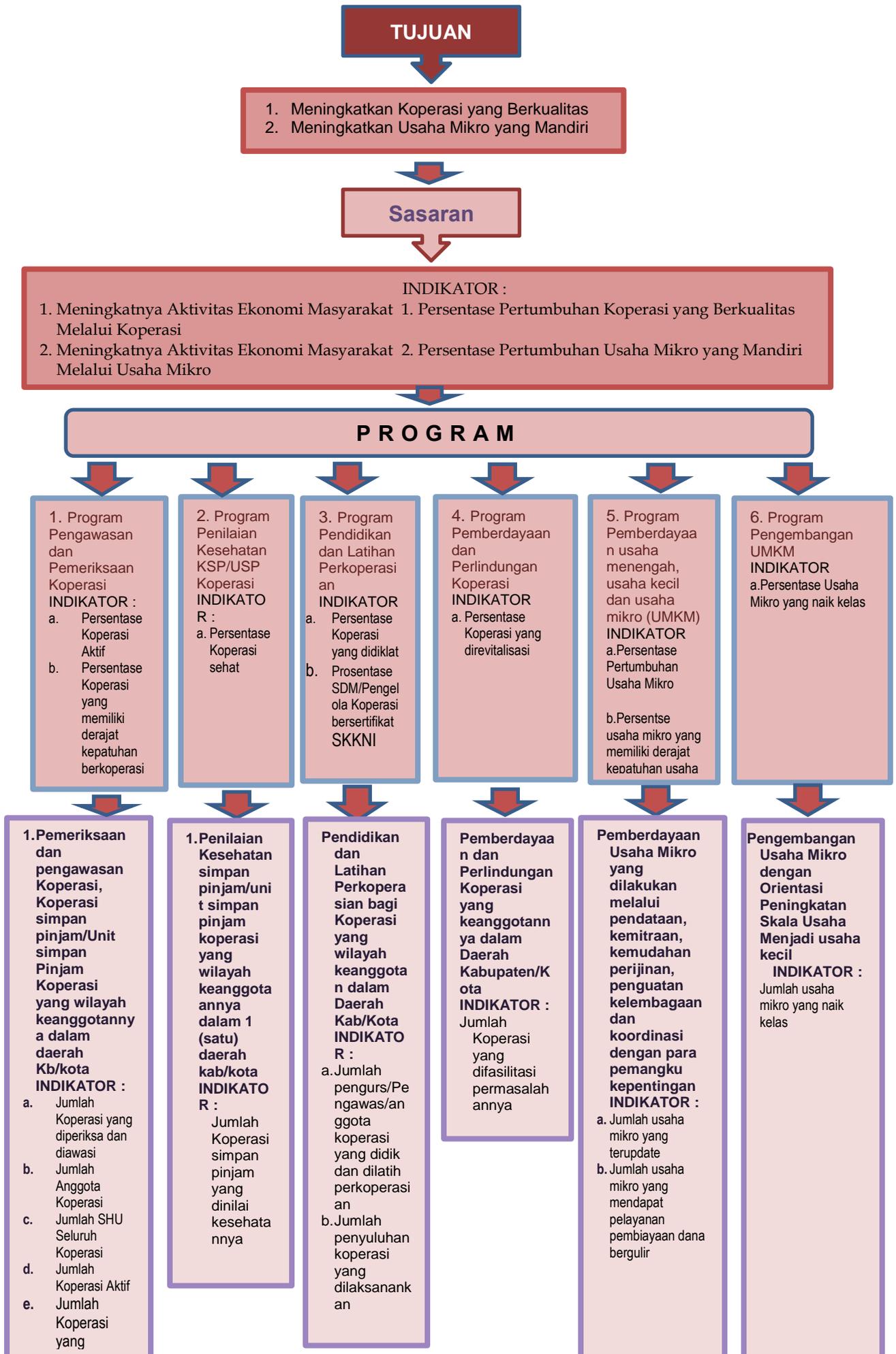
					9. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan wirausaha baru yang telah dilatih
--	--	--	--	--	---

POHON KINERJA CASCADING



13

POHON KINERJACASCADING sesudah PERMENDAGRI no.90 Tahun 2020



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo merupakan program prioritas RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Sidoarjo.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan - kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo.

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo menetapkan program dan kegiatan berdasarkan uraian prioritas sesuai isu strategis yang ada dan dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia meliputi :

sebelum adanya Permendagri no 90 tahun 2019 didukung dengan 3 Program yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
3. Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Setelah diterbitkannya Permendagri no 90 tahun 2019, maka program pada dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang mendukung Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi menjadi 6 (Enam) Program sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6. Program Pengembangan UMKM

Keenam program tersebut telah dijabarkan dalam beberapa kegiatan, yaitu :

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
2. Penilaian Kesehatan Koperasi simpan pinjam/Unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota
3. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah/kabupaten/kota
4. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

5. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
6. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
7. Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dan dijabarkan menjadi sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota
2. Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/Kota
4. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasianserta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi
5. Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
6. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro
7. Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro
8. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro

9. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

Keenam Program tersebut mempunyai sasaran sebagai berikut:

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan sasaran: Meningkatnya pengendalian pengawasan Koperasi .
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan sasaran : Meningkatnya Kesehatan Koperasi
3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan sasaran meningkatnya SDM Pengelola Koperasi
4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sasaran
 - a. Terciptanya wirausaha baru
 - b. Meningkatnya pengembangan pemasaran produk koperasi dan usaha mikro
 - c. Meningkatnya tatakelola dan pendampingan modal usaha bagi koperasi dan usaha mikro
 - d. Meningkatnya akses pembiayaan bagi koperasi dan usaha mikro
6. Program Pengembangang UMKM dengan sasaran :
 - a. Tersedianya akses teknologi tepat guna bagi koperasi dan usaha mikro
 - b. Meningkatnya kapasitas wirausaha
 - c. Meningkatnya pengembangan jaringan dan akses pasar usaha koperasi dan usaha mikro

Disamping program utama tersebut di atas yang mendukung secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro tahun 2016-2021, juga terdapat program penunjang yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun program dan kegiatan yang merupakan loyalitas kewenangan OPD adalah sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2016-2021 (Sebelum terbit Permendagri 90/2019)**

No	Program	Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional Penyediaan jasa kebersihan/keamanan kantor/pengemudi Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2	Program Pelayanan Kesekretariatan	Penyediaan barang/jasa Perkantoran Kegiatan Kedinasan Dalam daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

			<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur</p> <p>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Data dan Informasi PD</p> <p>Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja PD</p> <p>Penyusunan Laporan Keuangan</p>
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		<p>Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung/kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor</p> <p>Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>Pengadaan meubeleu</p>
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		<p>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</p> <p>Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai</p>
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan		<p>Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD</p> <p>Penyusunan laporan keuangan</p>
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		<p>Pengembangan dan pembinaan kelembagaan koperasi</p> <p>Penyuluhan dan fasilitasi advokasi koperasi</p>
7	Program Pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro		<p>Pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi</p> <p>Pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan usaha mikro</p> <p>Penyaluran dana bergulir kepada koperasi dan usaha mikro</p>
8	Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro		<p>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</p> <p>Penyusunan data base koperasi dan usaha mikro</p> <p>Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan usaha mikro</p> <p>Penyusunan kebijakan, melaksanakan, pelaporan kegiatan pengendalian pengawasan Koperasi</p>

Setelah terbit Permendagri no.90/2019

Tabel 5.1
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Tahun 2016-2021

Pemutakhiran Permendagri No.90 Tahun 2019		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1. Jumlah tahapan perencanaan yang
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu
	3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan
	02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
	03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan
	04 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia
	05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia
	06 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia
	07 Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	<ol style="list-style-type: none"> Persentase surat perintah tugas yang Ditindaklanjuti Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan
	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar Jumlah tenaga non ASN yang terbayar
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya
	02	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara
	03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang
	04	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara
	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan lainnya Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi
7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat		<ol style="list-style-type: none"> Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi . Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu
2 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			1. Presentase Koperasi Aktif 2. Presentase Koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi m daerah Kabupaten/kota		1. Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi 2. Jumlah anggota Koperasi 3. Jumlah SHU seluruh koperasi 4. Jumlah Koperasi aktif 5. Jumlah Koperasi yang didirikan/disahkan
	01	Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Koperasi yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan 2. Jumlah Koperasi yang menerapkan aspek kepatuhan
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			Presentase Koperasi sehat
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah		1. Jumlah Koperasi simpan pinjam yang dinilai kesehatannya
	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi sehat
	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan kesehatan koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			Persentase Koperasi yang didiklat
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota		1. Jumlah Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi yang dididik dan dilatih Perkoperasian 2. Jumlah penyuluhan koperasi yang dilaksanakan
	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM/Pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			Persentase Koperasi yang direvitalisasi
1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koperasi yang difasilitasi permasalahannya
	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas , Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.Jumlah Koperasi dengan Volume usaha meningkat 2.Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan penataan manajemen 3. Jumlah Koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir 4.Jumlah Koperasi yang terupdate
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO			1. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro 2. Persentase Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha mikro
1	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, kemudahan Perijinan, Penguatan kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan		1. Jumlah usaha mikro yang terupdate 2. Jumlah usaha mikro yang mendapat Pelayanan pembiayaan dana bergulir

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	01	Pendataan Potensi dan pengembangan Usaha mikro	Jumlah Usaha mikro yang terupdate
	02	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraannya
	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1. Jumlah usaha mikro yang mendapat perizinan usaha 2. Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha
	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha mikro	1. Jumlah usaha mikro yang didata potensi kelembagaannya 2. Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha
	05	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para Pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha mikro	1. Jumlah Koordinasi yang difasilitasi dalam pemberdayaan usaha mikro 2. Jumlah Pedagang informal yang dibina 3. Jumlah Pengelolaan sentra pedagang informal dalam kondisi baik
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			Prosentase Usaha mikro yang naik kelas
1	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi Peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Jumlah usaha mikro yang naik kelas
	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Indikator sub kegiatan : 1. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat Sertifikasi SKKNI 2. Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan Pemasarannya 3 jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Sebelum terbit Permendagri 90/2019)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perencanaan	2017	2018	2019	2020	2021	Unit Kerja SKPD penanggung jawab
Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	70	70%	70%	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya dan jenis rekening air, listrik, telepon yang dibayarkan	0	150.000.000	150.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK atau uji kir yang diurus	0	18 unit	18 unit	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi	a. Jumlah tenaga kebersihan/keamanan kantor/pengemudi yang dibayar b. Jumlah alat kebersihan/keamanan kantor yang disediakan	0	a. 13 Orang b. 20 unit	a. 13 Orang b. 20 unit	-	-	-	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan	0	18 Jenis	18 Jenis	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	0	11 Jenis	11 Jenis	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	0	12.500 liter	14.000 liter	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin yang disediakan	0	300 Kotak	1.920 Kotak	-	-	-	Sekretariat
Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	a. Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan b. Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan	0	a. 55 b. 90 c.5	a. 55 b. 90 c.5	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	0	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	0	4 Jenis	4 Jenis	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Listrik/penerangan kantor yang disediakan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	6 Jenis	5 Jenis	-	-	-	Sekretariat
Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PD	Nilai SKM	0	75	75	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan Barang/jasa								
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	0	80%	90%	-	-	-	Sekretariat
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	0	1	-	-	-	Sekretariat
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor	0	7 Jenis	10 Jenis	-	-	-	Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pelihara	0	R4 : 10 R2 : 28	R4 : 8 R2 : 12	-	-	-	Sekretariat
Pemeliharaan Meubeler	Jumlah meubeler yang di pelihara	0	25 unit	25unit	-	-	-	Sekretariat
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung	0	20 unit	20 unit	-	-	-	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

peralatan gedung kantor	kantor yang dipelihara							
Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	0	80%	90%	-	-	-	Sekretariat
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah dan jenis pakaian dinas yang disediakan	0	0	39 buah	-	-	-	Sekretariat
Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai	Jumlah mesin absensi yang diadakan dan di pelihara	0	1 buah	1 buah	-	-	-	Sekretariat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	0	75%	90%	-	-	-	Sekretariat
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0	6 Dok	6 Dok	-	-	-	Sekretariat
	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	0	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	Sekretariat
	Jumlah laporan keuangan yang disusun	0	2 Laporan	2 Laporan	-	-	-	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	-	-	-	80	80	80	Sekretariat
Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	-	-	-	1900 surat masuk; 1200 surat keluar	1900 surat masuk; 1200 surat keluar	1900 surat masuk; 1200 surat keluar	Sekretariat
	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	-	-	-	18 orang/ bln	18 orang/ bln	18 orang/ bln	Sekretariat
	Jumlah BBM yang disediakan	-	-	-	12.500 liter	14.000 liter	15.500 liter	Sekretariat
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	-	-	-	19 unit	19 unit	19 unit	Sekretariat
	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	-	-	-	1.000 kotak	1.000 kotak	1.000 kotak	Sekretariat
	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	-	-	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Sekretariat
	Jumlah premi asuransi barang	-	-	-	-	-	-	-

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	milik daerah yang terbayar							
	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	-	-	-	3 buah	3 buah	3 buah	Sekretariat
	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	-	-	-	10 buah	10 buah	10 buah	Sekretariat
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	-	-	-	10 buah	10 buah	10 buah	Sekretariat
	Jumlah tenaga penunjang administrasi perkantoran yang tersedia	-	-	-	10 orang	10 orang	10 orang	Sekretariat
	Jumlah jam lembur yang terbayar	-	-	-	0	0	0	Sekretariat
Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	-	-	-	90%	90%	90%	Sekretariat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang dibangun	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	-	-	-	2	2	2	Sekretariat
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/ru	-	-	-	10 unit	10 unit	10unit	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	mah dinas/jabatan yang diadakan							
	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/ jabatan yang direhab sedang/berat	-	-	-	1.500 M2	1.500 M2	1.500 M2	Sekretariat
Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Aparatur	Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang dipelihara	-	-	-	1.500 M2	1.500 M2	1.500 M2	Sekretariat
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	-	-	-	19 unit	19 unit	19 unit	Sekretariat
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/ jabatan yang dipelihara	-	-	-	384 unit	384 unit	384 unit	Sekretariat
Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Aparatur	Jumlah pakaian dinas/ kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	-	-	-	40 buah	40 buah	40 buah	Sekretariat
	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	-	-	-	40 buah	40 buah	40 buah	Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan,	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	-	-	-	2 dok	2 dok	2dok	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Penganggaran, Data dan Informasi PD								
	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	-	-	-	4 dok	4 dok	4 dok	Sekretariat
	Jumlah data dan informasi yang disusun	-	-	-	3 laporan	3 laporan	3 laporan	Sekretariat
Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja PD	Jumlah dokumen monev yang disusun	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	Sekretariat
	Jumlah dokumen SKM yang disusun	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	Sekretariat
	Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun	-	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Sekretariat
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	-	-	-	2 laporan	2 laporan	2 laporan	Sekretariat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	89,39%	89,39%	90,08%	90,78%	91,48%	92,18%	Bidang Kelembagaan Koperasi
Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah anggota koperasi	228.224	232.502	232.802	232.852	232.902	232.952	Bidang Kelembagaan Koperasi
	Jumlah SHU seluruh koperasi	56,6	57,4	56	60	62	65	Bidang Kelembagaan Koperasi
	Jumlah koperasi aktif	10	10	10	10	10	10	Bidang Kelembagaan Koperasi

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	Jumlah koperasi yang didirikan/ disahkan	10	10	10	10	10	10	Bidang Kelembagaan Koperasi
Penyuluhan dan Fasilitasi Advokasi Koperasi	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan	2	2	2	4	6	8	Bidang Kelembagaan Koperasi
	Jumlah koperasi yang difasilitasi permasalahannya	2	2	2	2	2	2	Bidang Kelembagaan Koperasi
Program Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi sehat	34,64%	36,03%	37,43%	38,83%	40,22%	41,62%	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase SDM/Pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI	18,02%	19,41%	20,81%	22,21%	23,60%	25,00%	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pertumbuhan usaha mikro	4,13%	4,28%	4,37%	4,49%	4,62%	4,75%	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI	30 orang	30 orang	90 orang	100 orang	120 orang	150 orang	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah koperasi dengan volume usaha meningkat	20 koperasi	20 koperasi	20 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	50 koperasi	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah koperasi dengan modal usaha meningkat	30 koperasi	30 koperasi	30 koperasi	-	-	-	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	Jumlah koperasi sehat	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah wirausaha baru	0	300	1.000	1.200	1.500	1.800	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah UM yang mengikuti sertifikasi	0	0	300 UM	400 UM	500 UM	600 UM	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat	0	130 UM	200 UM	230 UM	270 UM	300 UM	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir	1 koperasi	1 koperasi	4 koperasi	4 koperasi	4 koperasi	4 koperasi	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
	Jumlah usaha mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir	265 UM	295 UM	300 UM	350 UM	400 UM	450 UM	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan dalam berkoperasi	11%	12,08%	12,78%	13,48%	14,18%	14,87%	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase usaha mikro yang memiliki derajat	0,01%	12,01%	24,01%	36,01%	48,01%	60,01%	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	kepatuhan usaha mikro							
Penyusunan Kebijakan, Melaksanakan, Pelaporan Kegiatan, Pengendalian Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang menerapkan SPI	0	150 koperasi	162 koperasi	-	-	-	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Penyusunan Kebijakan, Melaksanakan, Pelaporan Kegiatan, Pengendalian Pengawasan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikat bagi pengelolanya	0	100	90	-	-	-	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terupdate	0 koperasi; 0 UM	10 koperasi; 100 UM	10 koperasi; 100 UM	10 koperasi; 100 UM	500 koperasi; ;1000 UM	500 koperasi; 1000 UM	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang dimonev	0	153 koperasi 250 UM	162 koperasi; 300 UM	-	-	-	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah koperasi yang menerapkan aspek kepatuhan	0	-	-	171 koperasi	180 koperasi	188 koperasi	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan dan Pengendalian Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha	0	-	-	325 UM	350 UM	375 UM	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Sesudah terbit Permendagri 90/2019)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				
			2017	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Indikator Program : Persentase Koperasi Aktif	89,39%	90,08%	90,78%	82%	92,18%
		Rumus : (Koperasi Dalam Pendampingan : Koperasi Tidak Aktif) x 100%					
		Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi	12,01%	24,01%	36,01%	48,01%	60,01%
		Rumus : (Jumlah Koperasi Yang memiliki derajat kepatuhan : Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%					
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan : a. Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	0	0	0	0	250	
	b. jumlah anggota koperasi	232.502	232.802	232.852	232.902	232.952	
	c. jumlah SHU seluruh koperasi	57,4M	58M	60M	62M	65M	
	d.jumlah koperasi aktif	10	10	10	10	10	
	e. jumlah koperasi yang didirikan/ disahkan	10	10	10	10	10	

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Koperasi yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	200
		b. Jumlah koperasi yang menerapkan aspek kepatuhan	0	0	150	100	188
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Indikator Program : Persentase Koperasi Sehat					
		Rumus : (Koperasi yang Dinilai Kesehatannya : Koperasi Aktif) x 100%	36,03%	37,43%	38,83%	40,22%	41.62%
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang Dinilai Kesehatannya	0	0	0	0	50
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Koperasi Sehat	100	100	100	100	100
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan kesehatan koperasi	0	0	0	0	30
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Indikator Program : Persentase koperasi yang di diklat	-				
		Rumus : (Koperasi yang Didiklat : Koperasi Aktif) x 100%					19,31%
		Prosentase SDM/Pengelola Koperasi bersertifikat SKKNI	19,41%	20,81%	22,21%	23,60%	25%

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

		Rumus : (Jumlah SDM/Pengelola Koperasi bersertifikat SKKNI : Jumlah Pengelola/Pengurus Koperasi yang Bersertifikat SKKNI seluruhnya) x 100%					
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan : a. Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang dididik dan dilatih Perkoperasian b. jumlah penyuluhan koperasi yang dilaksanakan	0	0	0	0	405
			0	2	4	6	8
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Indikator Sub Kegiatan : jumlah SDM/pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI	30	90	100	120	25
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Indikator Program : Persentase Koperasi yang direvitalisasi					
		Rumus : (Koperasi yang Direvitalisasi : Koperasi Tidak Aktif) x 100%	0	0	0	0	0,52%
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permasalahannya	0	2	2	2	2
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Koperasi dengan Volume Usaha Meningkat	20	20	30	30	150

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	b. Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan penataan manajemen	0	0	0	0	160
		c. jumlah koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir	1	4	4	0	4
		d. Jumlah koperasi yang terupdate	500	500	500	500	500
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Indikator Program : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro					
		Rumus : (Jumlah Usaha Mikro yang terdata : Jumlah Seluruh Usaha Mikro) x 100%	4,25%	4,37%	4,49%	4,62%	4,75%
		Persentase Usaha mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha mikro					
		Rumus : (Jumlah Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan : Jumlah Seluruh Usaha Mikro) x 100%	12,01%	24,01%	36,01%	48,01%	60,01%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Indikator Kegiatan : a. Jumlah Usaha Mikro yang ter update	1000	1000	1000	1000	1000
		b. Jumlah usaha mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir	295	300	350	300	450
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Usaha Mikro yang ter update	1000	1000	1000	1000	300

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraannya	0	0	0	0	100
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Usaha Mikro yang Mendapat Perizinan Usaha	0	0	0	0	100
		b. Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha	0	0	325	200	375
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Koordinasi yang Difasilitasi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30	30	30	30	30
		b. Jumlah pedagang informal yang di bina	0	0	0	0	50
		c. Jumlah Pengelolaan sentra pedagang informal dalam kondisi baik	0	0	0	0	1
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Indikator Program : Prosentase Usaha Mikro yang naik kelas	0	0	0	0	1,64%
		Rumus : (Jumlah UM yang Naik Kelas : Jumlah UM yang Dibina) x 100%					
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Indikator Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	0	0	0	0	100

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Indikator sub kegiatan :					
		a. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat Sertifikasi SKKNI	0	300	100	100	150
		b. Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan Pemasarannya	0	0	0	0	300
		c. jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat	130	200	100	100	50

Program Pendukung

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				
			2017	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	70%	70%	70%	75%	75%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	0	0	0		
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2	2	2	2	2
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	6	6	6	6	6
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase realisasi anggaran PD	90%	90%	90%	90%	90%
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	35	35	40	40	40
	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	2	2	2	2	2
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	0	0	0	85%	85%
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	10	10	10	10	3
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia					
	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia					
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	0	12500	14000	61600	
	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	11	11	11	28	11

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	3	3	3	2	2
	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	0	0	0	0	3
	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	0	300	1920	1000	600
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	0	0	90%	90%	90%
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan					
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	10	10	10	16	3
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran					
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	3100	3100	3100	3100	3100
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12	12	12	12	12
	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi baik	0	0	0	0	90%
	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 4.. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	0	4	10	10	10

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan					
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	18	18	18	18	18
	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	0	0	0	0	25
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	20	20	20	20
	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	0	0	0	0	2
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	1500	1500	1500	1500	1500
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	25	25	25	25	25
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi					
	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	0	0	0	0	4

Tabel 5.2
Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Sebelum terbit Permendagri 90/2019)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Unit Kerja SKPD penanggung jawab
Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	0	1.503.500.000	1.553.500.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya biaya rekening, air, listrik dan telepon dalam 12 bulan	0	150.000.000	200.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat yang dipelihara dan STNK serta uji kir yang diurus	0	10.000.000	10.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga outsourcing kebersihan/jeni	0	150.000.000	150.000.000	-	-	-	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	s dan jumlah alat kebersihan yang disediakan							
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan Jenis alat tulis kantor yang disediakan	0	65.000.000	65.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan	0	50.000.000	50.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	0	130.000.000	130.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin yang disediakan	0	40.000.000	40.000.000	-	-	-	Sekretariat
Rapat Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	0	500.000.000	500.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	0	300.000.000	300.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	0	75.000.000	75.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyediaan Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen Listrik/penerangan kantor yang disediakan	0	25.000.000	25.000.000	-	-	-	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0	8.500.000	8.500.000	-	-	-	Sekretariat
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	0	510.000.000	615.000.000	-	-	-	Sekretariat
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor	0	450.000.000	450.000.000	-	-	-	Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang di pelihara	0	25.000.000	115.000.000	-	-	-	Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah/unit gedung kantor yang dipelihara	0	5.000.000	10.000.000	-	-	-	
Pemeliharaan Meubeler	Jumlah meubeler yang di pelihara	0	10.000.000	20.000.000	-	-	-	Sekretariat
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	0	0	21.000.000	-	-	-	Sekretariat
Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah dan jenis palaian dinas yang disediakan	0	0	15.000.000	-	-	-	

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Pengadaan dan pemeliharaan mesin absensi pegawai	Jumlah mesin absensi yang diadakan dan di pelihara	0	0	6.000.000	-	-	-	Sekretariat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	0	50.000.000	50.000.000	-	-	-	Sekretariat
Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	a. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun b. Jumlah laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	0	50.000.000	50.000.000	-	-	-	Sekretariat
Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	-	-	-	5.062.000.000	7.277.000.000	9.492.000.000	Sekretariat
Penyediaan barang/jasa perkantoran	a. Jumlah surat keluar masuk yang dikelola; b. Jumlah pengelola	-	-	-	5.062.000.000	7.277.000.000	9.492.000.000	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	keuangan dan barang yang terbayar c. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar d. Jumlah BBM yang disediakan e. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya f. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan g. Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar h. Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar i. Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia j. Jumlah komponen							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	<p>listrik/penerangan yang tersedia k. Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia l. Jumlah tenaga penunjang administrasi perkantoran yang tersedia m. Jumlah jam lembur yang terbayar</p>							
Kegiatan Kedinasan Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	-	-	-	2.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	Sekretariat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p>a. Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang dibangun b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan c. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah</p>	-	-	-	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	dinas/jabatan yang diadakan d. Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/ jabatan yang direhab sedang/berat							
Pengelolaan dan Penatalaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Sekretariat
Pemeliharaan Sarana dan Prsarana Aparatur	a. Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/ dinas yang dipelihara b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara c. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor/rumah dinas/ jabatan yang dipelihara	-	-	-	500.000.000	600.000.000	700.000.000	Sekretariat
Peningkatan Kapasitas Aparatur	a. Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti	-	-	-	75.000.000	80.000.000	85.000.000	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	<p>pelatihan/bimtek</p> <p>b. Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/seminar</p>							
<p>Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapan Aparatur</p>	<p>a. Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia</p> <p>b. Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia</p>	-	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Sekretariat
<p>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Data dan Informasi PD</p>	<p>a. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun</p> <p>b. Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)</p> <p>c. Jumlah data dan informasi yang disusun</p>	-	-	-	55.000.000	60.000.000	65.000.000	Sekretariat
<p>Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kinerja PD</p>	<p>a. Jumlah dokumen monev yang disusun</p>	-	-	-	50.000.000	55.000.000	60.000.000	Sekretariat

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	b. Jumlah dokumen SKM yang disusun c. Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun							
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	-	-	-	50.000.000.000	50.000.000	50.000.000	Sekretariat
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	0	250.000.000	560.000.000	870.000.000	1.180.000.000	1.490.000.000	Bidang Kelembagaan Koperasi
Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi	a. Jumlah anggota koperasi b. Jumlah SHU seluruh koperasi c. Jumlah koperasi aktif d. Jumlah koperasi yang didirikan/disahkan	0	250.000.000	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	Bidang Kelembagaan Koperasi
Penyuluhan dan Fasilitasi Advokasi Koperasi	a. Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan b. Jumlah koperasi yang difasilitasi	0	0	60.000.000	120.000.000	180.000.000	240.000.000	Bidang Kelembagaan Koperasi

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	permasalahannya							
Program Pemberdayaan, Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	a. Persentase koperasi sehat b. Persentase SDM/Pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI c. Persentase pertumbuhan usaha mikro	0						Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi	a. Jumlah SDM pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI b. Jumlah koperasi dengan volume usaha meningkat c. Jumlah koperasi dengan modal usaha meningkat d. Jumlah koperasi sehat	0	500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro	a. Jumlah wirausaha baru b. Jumlah UM yang mengikuti sertifikasi	0	500.000.000	1.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	c. Jumlah UM yang mengikuti sertifikasi d. Jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat							
Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi dan Usaha Mikro	a. Jumlah koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir b. Jumlah usaha mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir	0	350.000.000	450.000.000	550.000.000	650.000.000	750.000.000	Bidang Bina Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Program Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	a. Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan dalam berkoperasi b. Persentase usaha mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha mikro	11%	12,08%	12,78%	13,48%	14,18%	14,87%	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

Penyusunan Kebijakan, Melaksanakan, Pelaporan Kegiatan, Pengendalian Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang menerapkan SPI	0	50.000.000	100.000.000	-	-	-	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Penyusunan Kebijakan, Melaksanakan, Pelaporan Kegiatan, Pengendalian Pengawasan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki ijin usaha dan sertifikat bagi pengelolanya	0	50.000.000	100.000.000	-	-	-	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Penyusunan Database Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terupdate	0	0	600.000.000	700.000.000	800.000.000	900.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi dan usaha mikro yang dimonev	0	50.000.000	50.000.000	-	-	-	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan dan Pengendalian Koperasi	Jumlah koperasi yang menerapkan aspek kepatuhan	-	-	-	300.000.000	400.000.000	400.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
Pembinaan dan Pengendalian Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha	-	-	-	300.000.000	400.000.000	500.000.000	Bidang Pengendalian dan Pengawasan

Tabel 5.2
Pendanaan Indikatif
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo (Sesudah terbit Permendagri 90/2019)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Kegiatan	Sub	Dana				
			2017	2018	2019	2020	2021
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Indikator Program : Persentase Koperasi Aktif		0	0	0	0	
	Rumus : (Koperasi Dalam Pendampingan : Koperasi Tidak Aktif) x 100%						
	Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan berkoperasi						
	Rumus : (Jumlah Koperasi Yang memiliki derajat kepatuhan : Jumlah Koperasi seluruhnya) x 100%						
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan : Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	a.					
	b. jumlah anggota koperasi						
	c. jumlah SHU seluruh koperasi						
	d.jumlah koperasi aktif						
	e. jumlah koperasi yang didirikan/ disahkan						

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Koperasi yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	74.417.500
		b. Jumlah koperasi yang menerapkan aspek kepatuhan					
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Indikator Program : Persentase Koperasi Sehat					
		Rumus : (Koperasi yang Dinilai Kesehatannya : Koperasi Aktif) x 100%					
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Indikator Kegiatan : Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang Dinilai Kesehatannya					
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Koperasi Sehat	0	0	0	0	48.750.000
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan kesehatan koperasi	0	0	0	0	90.075.146

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Indikator Program : Persentase koperasi yang di diklat	-					
		Rumus : (Koperasi yang Didiklat : Koperasi Aktif) x 100%						
		Prosentase SDM/Pengelola Koperasi bersertifikat SKKNI						
		Rumus : (Jumlah SDM/Pengelola Koperasi bersertifikat SKKNI : Jumlah Pengelola/Pengurus Koperasi yang Bersertifikat SKKNI seluruhnya) x 100%						
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan : a. Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang dididik dan dilatih Perkoperasian b. jumlah penyuluhan koperasi yang dilaksanakan						
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Indikator Sub Kegiatan : jumlah SDM/ pengelola koperasi yang bersertifikat SKKNI	0	0	0	0	903.953.494	

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Indikator Program : Persentase Koperasi yang direvitalisasi					
		Rumus : (Koperasi yang Direvitalisasi : Koperasi Tidak Aktif) x 100%					
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Kegiatan : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permasalahannya					
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Koperasi dengan Volume Usaha Meningkat					
		b. Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitas peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan dan penataan manajemen	0	0	0	0	181.589.110
		c. jumlah koperasi yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir					
		d. Jumlah koperasi yang terupdate					
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Indikator Program : Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro					
		Rumus : (Jumlah Usaha Mikro yang terdata : Jumlah Seluruh Usaha Mikro) x 100%					

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

		Persentase Usaha mikro yang memiliki derajat kepatuhan usaha mikro					
		Rumus : (Jumlah Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan : Jumlah Seluruh Usaha Mikro) x 100%					
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Indikator Kegiatan : a. Jumlah Usaha Mikro yang ter update					
		b. Jumlah usaha mikro yang mendapat pelayanan pembiayaan dana bergulir					
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang ter update a.	0	0	0	0	40.823.045
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi Kemitraannya a.					85.261.500
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Mendapat Perizinan Usaha a.					25.113.045
		b. Jumlah usaha mikro yang memiliki legalitas usaha					

RENSTRA 2016-2021 (REVIEW)

	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Indikator Sub Kegiatan : a. Jumlah Koordinasi yang Difasilitasi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro b. Jumlah pedagang informal yang di bina c. Jumlah Pengelolaan sentra pedagang informal dalam kondisi baik						114.369.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Indikator Program : Prosentase Usaha Mikro yang naik kelas Rumus : (Jumlah UM yang Naik Kelas : Jumlah UM yang Dibina) x 100%						
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Indikator Kegiatan : Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas						
	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Indikator sub kegiatan : a. Jumlah Usaha Mikro yang mendapat Sertifikasi SKKNI b. Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan Pemasarannya c. jumlah usaha mikro dengan volume usaha meningkat						238.214.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021, dan merupakan akumulasi target setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai untuk mewujudkan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021.

Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada periode 2016 - 2021 sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN OPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri	0,15 %	0,17 %	0,20 %	0,22 %	0,25 %	0,25%
2	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas	0,96%	1,14%	1,32%	1,50%	1,68%	1,68%

Tabel 6.2
Target Indikator Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Sesuai Dengan RPJMD

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2021)
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	89,39%	90,08%	90,78%	8%	82%	92,18%
2	Program pengendalian dan pengawasan koperasi dan usaha mikro	Persentase koperasi yang memiliki derajat kepatuhan dalam berkoperasi	11,00%	12,08%	12,78%	13,48%	14,18%	14,87%
		Persentase Usaha Mikro yang memiliki derajat kepatuhan dalam Usaha Mikro	0,01%	12,01%	24,01%	36,01%	48,01%	60,01%
3	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi sehat	34,64%	36,03%	37,43%	38,83%	40,22%	41,62%
		Persentase SDM/Pengelola Koperasi bersertifikat SKKNI	18,02%	19,41%	20,81%	22,21%	23,60%	25,00%
		Persentase Pertumbuhan Usaha mikro	4,13%	4,25%	4,37%	4,49%	4,62%	4,75%

4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan Aparatur SKPD terhadap pelayan administrasi perkantoran	70%	70%	70%	-	-	-
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	40%	45%	50%	-	-	-
6	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase aparatur yang disiplin	80%	80%	90%	-	-	-
7	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase jumlah dokumen perencanaan, lap keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu	70%	70%	90%	-	-	-
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tingkat kelulusan peserta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dikirim dan bersertifikat	75%	75%	75%	-	-	-
9	Program kesekretariatan	Tingkat kepuasan	-	-	-	70%	75%	80%

		aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu RPJMD

SASARAN/OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro yang mandiri	Persentase Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}} \times 100\%$	ODS	Bidang Kelembagaan Koperasi
	Persentase Usaha Mikro Yang Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Usaha Mikro yang Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh Usaha Mikro}} \times 100\%$	Laporan Bina Usaha Mikro	Bidang Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

BAB VII

PENUTUP

Review Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria penilaian yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penerapan program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang akan dilaksanakan pada periode 2016 -2021 yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak yang terkait.

Perlu disampaikan bahwa Review Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Potensi dan kondisi Koperasi dan Usaha Mikro diperkirakan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan mengalami perkembangan kearah pertumbuhan, oleh sebab itu berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik.

Adapun yang menjadi fokus pada pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sidoarjo adalah : penciptaan wirausaha baru; peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro; Akses Pembiayaan; Akses Pasar; Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro; Kualitas Tatakelola Kelembagaan Koperasi; yang disertai kerjasama antara Pemerintah dan Stakeholders terkait serta iklim usaha yang kondusif.

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2020 merupakan salah satu respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel dan dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan. Hasil Review Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 -2021 ini menjadi acuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing - masing bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel serta mengedepankan peningkatan capaian kerja.

Diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro akan membawa kemajuan serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dengan dukungan semua pihak terkait.

